

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahwal, Sirman , 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Djamali, R., Abdoel, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.
- Giok, Lie, Tan dan Casthelia Kartika, 2012, *Pria dan Wanita Menurut Prespektif Alkitab*, Bandung: Visi Anugrah Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- Hakim, Lukman, 2010, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia Eksistensi Komisi-Komisi Negara (State Auxiliary Agency) Sebagai Organ yang Mandiri Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Malang: PPS Universitas Brawijaya.
- Idris Ramulyo, Mohd., 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- , 2006, *Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan Agama, dan zakat menurut hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ihza Mahendra, Yusril, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani.
- Mappiasse, Syarif, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga.
- Meade, Star, 2004, *Training hearts Teaching Minds; Renungan Keluarga Berdasarkan Katekismus Singkat Westminster*, Surabaya: Momentum.
- Mulyadi, 1995, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

- Mulyadi, Lilik, 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Badher Johan, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara Jakarta.
- Prins, J., 1982, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikiro, Wirjono, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bndung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rasaid, M.Nur, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia* , Kencana : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soimin, Soedharyo, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tam. R dan Rusli, 1986, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*, Bandung: Pionir Jaya.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Wahjono, Padmo, 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

**b. E-book**

- Nugrahani, Farida, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: LPPM Univet Bantara. Dari <http://digilibfkip.univetbantara.ac.id/materi/Buku.pdf>

### c. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945. Diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari [http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974\\_UU-1-TAHUN-1974\\_PERKAWINAN.pdf](http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Diakses dari <https://pih.kemlu.go.id/files/19.%20%20UU.%20No%2024%20Th%202013.pdf>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Diakses dari [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_48.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Diakses dari <https://pusatdata.hukumonline.com/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/pusatdata/viewfile/fl55533/parent/27909>

### d. Jurnal

Achmad Muchaddam, 2014, "Hukum Perkawinan Beda Agama", *Kajian Singkat Isu-Isu Terkini*, Vol VI No. 23 Desember 2014, hal 10 dan 11, diakses [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VI-23-I-P3DI-Desember-2014-26.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-23-I-P3DI-Desember-2014-26.pdf)

Dachran Busthami, 2017, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, XLVI No. 4 Oktober 2017, hal 338-341 diakses dari

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/15548/12671>

Gusti Ayu Tirtawati dan Retna Dwi Savitri, 2009. “Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia”, *Hukum Prioritas*, Vol 2 No. 3 September 2009, hal 176-187, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/81817-ID-aspek-hukum-perkawinan-wni-beda-agama-ya.pdf>

Moh. Faizur Rohman, 2017, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”, *Hukum dan Perundangan Islam*, Vol 7 No. 1 April 2017, hal 1-24 diakses dari <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/446/404>

Muhammad Ashsubli, 2015, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama”, *Cita Hukum*, Vol 3 No 2, 2015, hal 269-288, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319/1748>

Santoso, 2016, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 7 No. 2 Desember 2016, hal 413-429, diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2162/1790>

Zaidah Nur Rosidah, 2013, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama”, Vol XXII No. 1 April 2013, hal 2-18, diakses dari <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/download/70/41>

#### e. Skripsi

Felisia Sinta, Agnes, 2019, “Izin Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri (Studi Perbandingan Putusan No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt dan Putusan No.71/Pdt.P/2017/PN.Bla), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Setiabudi Lysa, 2016, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda

Agama), Skripsi, Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

**f. Internet**

Kartika Erma, Timur, Abdul Rachmad Budiono dan Rachmi Sulistyarini, “Penetapan Pengadilan Dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap penetapan nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)”, Internet, 27 April 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/35376-ID-penetapan-pengadilan-dalam-mengabulkan-dan-tidak-menerima-permohonan-perkawinan.pdf>.

Muhyidin dan Ayu Zahara, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, Internet, 25 April 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/6545/3404>.

Rozak Abd, A, “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama”, Internet, 25 April 2020, [http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan\\_beda\\_agama.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf)

**g. Website**

<https://dispendukcapil.surakarta.go.id/persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-akta-perkawinan/> diakses pada tanggal 19 April 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 27 Maret 2020.